

KONDISI DAN KEBIJAKAN SISTEM PERBUKUAN NASIONAL

**H. E. Kosasih, M.Pd.
ekos_kosasih@yahoo.com**

Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
2008

BAGAIMANA JIKA

- ❑ Penulis, pengarang, penerjemah, penyadur, penyunting, pengilustrasi, mampu mengembangkan buku sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya.
- ❑ Pengusaha industri perbukuan mendirikan penerbitan yang kuat dengan tenaga penyunting yang kompeten.
- ❑ Pengusaha toko buku mengembangkan sistem distribusi yang cepat melalui toko buku konvensional atau toko buku internet, dan perpustakaan sampai ke daerah-daerah.
- ❑ Pengimpor dan pengeksportor buku mendatangkan buku-buku dan menjual buku-buku yang bermutu.

DAPAT DIYAKINI

- Bangsa Indonesia akan kuat dari berbagai segi: intelektual, spiritual, IPTEKS, ekonomi, sosial, politik, budaya, dll.
- Visi Indonesia tahun 2030 menjadi 5 besar dunia dalam bidang ekonomi dapat kita raih.
- Bangsa Jepang, Korea, Thailand, Singapura, Malaysia, dan India telah menjababnya.

MENGAPA?

- Buku merupakan produk budaya (*cultural product*), yakni sebuah benda yang menjadi perwujudan fisik dari pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia
- Buku merupakan bagian dari suatu tingkah laku budaya (*cultural behavior*), baik dipandang dari sudut pembaca maupun penulis
- Buku merupakan proses produksi budaya (*cultural production*).

PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

- Mengingat begitu besarnya masalah perbukuan di Indonesia serta manfaat yang dapat diraih jika masalah perbukuan dapat dipecahkan, diperlukan berbagai strategi pengembangan perbukuan di Indonesia yang diarahkan kepada masalah yang berkaitan dengan kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan budaya.
- Hingga saat ini belum ada wadah yang mengatur masalah industri perbukuan maupun pemanfaatan buku.
- Agar strategi yang dikembangkan efektif, diperlukan payung hukum yang kuat, yakni melalui Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional.

MUTU BUKU

- Buku-buku yang ditulis belum didasarkan atas hasil penelitian yang mendalam dan metode penyedilikan yang jelas (Kleden, 1999:49).
- Hasil survei di Sumatra dan Kalimantan Barat terhadap buku terbitan swasta menunjukkan materi buku yang digunakan di kedua daerah tersebut disusun dari bahan yang tercantum dalam kurikulum tanpa pengolahan yang berarti (Cohen, 1986:16).
- Berdasarkan pengalaman penilaian yang dilakukan Pusat Perbukuan Depdiknas terhadap kualitas buku teks pelajaran terbitan swasta, ditemukan bahwa rata-rata hanya 50% buku teks pelajaran yang memenuhi syarat untuk digunakan di sekolah (Pusat Perbukuan, 2004, 2005).

- Buku-buku yang dimiliki perpustakaan perguruan tinggi sebagian besar buku lama. Jenis buku ini pun masih didominasi oleh buku teks dan masih jarang didapatkan buku-buku keilmuan yang berfungsi sebagai pendukung penelitian (Lasa, 1995).
- Rata-rata sorotan para peresensi buku memberikan gambaran umum tentang dunia perbukuan dari jumlah produk baru yang sedikit serta belum mencapai standar minimal dari segi manajemen kualitas total dunia perindustrian, seperti mutu cetakan, promosi, dan editorial. Kelompok peresensi ini pun masih sedikit jumlahnya (Parera, 1995).

MINAT MEMBELI BUKU

- ❑ Harga buku menjadi alasan bagi rendahnya minat baca dan minat buku, faktor ini tidak terlepas pula dari sikap masyarakat yang belum menjadikan buku sebagai kebutuhan pokok.
- ❑ Padahal, televisi sudah dijadikan kebutuhan pokok mulai dari kalangan kelas ekonomi bawah (Suryaman, 2001).

JUMLAH PENERBIT

- Menurut laporan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) jumlah penerbit sebanyak 472 anggota aktif dari 606 yang terdaftar (Taryadi, 1999).
- Data tahun 2007, jumlah penerbit mengalami peningkatan, yakni menjadi 793 buah, dengan 786 sebagai anggota IKAPI Daerah dan IKAPI Perwakilan serta 7 sebagai non-IKAPI Daerah/Perwakilan (IKAPI Pusat, 2007).
- Yang menjadi persoalan adalah distribusi penerbit masih terpusat di Pulau Jawa.

DISTRIBUSI BUKU

- Sampai dengan tahun 1996 terdapat 2.902 toko buku. Jika dibandingkan dengan jumlah desa, yakni 65.198 (sekarang tentu sudah bertambah), jumlah toko buku ini jelas tidak memadai.
- Jumlah yang tidak memadai berdampak kepada akses perolehan buku yang tidak merata (Sitepu, 1996; Taryadi, 1999).

KOMPONEN PERBUKUAN

■ Pembuat buku

- pencipta gagasan buku (pengarang/penulis, penerjemah, penyadur)
- pencipta perwajahan buku (perancang dan pengilustrasi)
- penyunting
- penerbit
- pencetak
- penyalur (toko buku)
- pengimpor/pengekspor buku

■ Pengguna buku

■ Pengatur buku

KETERSEDIAAN BUKU

- Jumlah buku baru per tahun baru mencapai 19 judul untuk satu juta penduduk.
- Dana yang dikeluarkan oleh perpustakaan perguruan tinggi dalam belanja buku belum sampai 5% dari anggaran yang dimiliki perguruan tinggi.
- Tingkat kepemilikan buku untuk tingkat SD di Indonesia belum mencapai rasio yang ideal, yakni 1:1. Hingga 1997, untuk mata pelajaran pokok di SD, rata-rata rasio kepemilikan merentang dari 1:1,2 sampai dengan 1:6,2.
- Rasio ketersediaan buku paket 1:1 baru di dicapai pada tingkat SMP dengan rasio dan rentangan 1:0,91-1, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan Ekonomi.
- 13912094372116

3. Penerbitan

- a. Hak dan kewajiban penerbit.
- b. Syarat-syarat penerbitan buku.
- c. Izin penerbitan buku oleh pihak asing.
- d. Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.
- e. Pengendalian mutu buku.
- f. Penerbitan buku oleh perguruan tinggi.

4. Perwajahan Buku

- a.** Hak dan kewajiban pembuat wajah buku
- b.** Syarat-syarat perwajahan buku.
- c.** Pengendalian mutu perwajahan buku.

5. Pengilustrasian

- a.** Hak dan kewajiban pembuat ilustrator.
- b.** Syarat-syarat ilustrasi buku.
- c.** Pengendalian mutu ilustrasi buku.

6. Penyuntingan

- a. Hak dan kewajiban penyunting buku
- b. Syarat-syarat penyuntingan buku.
- c. Pengendalian mutu penyuntingan buku.

6. Pencetakan

- a. Hak dan kewajiban pencetak buku
- b. Syarat-syarat pencetakan buku.
- c. Pengendalian mutu cetak buku.
- d. Pengendalian ketersediaan dan harga bahan baku cetak.

7. Pendistribusian

- a. Hak dan kewajiban distributor buku.
- b. Syarat-syarat distributor buku.

8. Perdagangan Buku

- a. Hak dan kewajiban pedagang buku.
- b. Syarat-syarat pedagang buku.

9. Penggunaan

- a. Hak dan kewajiban pengguna buku.
- b. Fasilitasi bagi pengguna buku.

10. Pendanaan

Pembebanan dana/anggaran pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk kepentingan dana pengadaan buku.